

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 26 September 2023
KATEGORI : Hukum Internasional

Tiongkok Klaim Pemasangan Penghalang Apung Sah

BEIJING - Tiongkok mengklaim pemasangan penghalang apung di Laut China Selatan yang disengketakan sah. Ke-

menterian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa penjaga pantai Tiongkok mengambil tindakan yang diperlukan sesuai

tindakan yang tepat untuk menghilangkan hambatan", sehingga berpotensi menimbulkan konfrontasi dengan penjaga pantai Tiongkok.

"Kami mengutuk pemasangan penghalang terapung yang dilakukan penjaga pantai Tiongkok," kata Eduardo Ano dalam sebuah pernyataan. "Penempatan penghalang oleh Republik Rakyat Tiongkok melanggar hak penangkapan ikan tradisional para nelayan kami."

Langgar Hukum Internasional

Departemen Luar Negeri Filipina, Senin (25/9) kemarin, mengatakan bahwa penghalang tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Karenanya Filipina akan "mengambil semua tindakan yang tepat untuk melindungi kedaulatan negara kami dan kehidupan

para nelayan kami".

Personel penjaga pantai dan biro perikanan Filipina menemukan penghalang terapung, yang panjangnya diperkirakan 300 meter, saat melakukan patroli rutin pada hari Jumat di dekat perairan dangkal yang oleh penduduk setempat dikenal sebagai Bajo de Masinloc.

"Kita harus sangat berhati-hati (untuk tidak melakukan) kesalahan langkah diplomatik apa pun," kata Komodor Jay Tamiela, juru bicara penjaga pantai, dalam sebuah wawancara radio, ketika ditanya apakah penjaga pantai berencana untuk menghilangkan penghalang tersebut, kemarin.

Menurut para nelayan Filipina, penjaga pantai Tiongkok biasa memasang penghalang

dengan hukum untuk mengusir kapal Filipina.

Juru Bicara Kementerian Luar negeri Tiongkok, Wang Wenbin menyampaikan hal itu pada Senin (25/9) setelah Filipina mengatakan pelampung di dekat Scarborough Shoal mencegah warga Filipina menangkap ikan di daerah tersebut. Wang tidak merinci undang-undang mana yang dia kutip untuk membenarkan pemasangan penghalang tersebut.

Tiongkok mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan, wilayah yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Filipina.

Di Manila, penasihat keamanan nasional Filipina kemarin (25/9) mengatakan bahwa negara itu akan mengambil "semua

seperti itu ketika mendapati sejumlah besar nelayan di wilayah tersebut. Namun mereka kemudian melepaskannya.

Scarborough Shoal berada dalam ZEE Filipina sepanjang 200 mil laut (370 km) sebagaimana didefinisikan oleh hukum maritim internasional dan ditegaskan oleh keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional Den Haag.

Beijing mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayahnya dan menyebut Scarborough Shoal sebagai Pulau Huangyan. Pada tahun 2012, Beijing merebut kendali Scarborough Shoal dari Filipina dan memaksa nelayan Filipina melakukan perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan tangkapan yang lebih kecil. (aljazeera-mn-44)